

## GLOBALISASI DAN PERGESERAN OTORITAS DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Oleh:

**Aulia Laila Azzahra<sup>1</sup>**

**Intan Tri Permatasari<sup>2</sup>**

**Irfan Fauzi<sup>3</sup>**

Sekolah Tinggi Agama Islam “UISU” Pematangsiantar

Alamat: JL. Sangnawaluh Km. 4, 5, Pahlawan, Kec. Siantar Tim., Kota Pematang  
Siantar, Sumatera Utara (21136)

Korespondensi Penulis: [Botzah13@gmail.com](mailto:Botzah13@gmail.com), [permatatri137@gmail.com](mailto:permatatri137@gmail.com),  
[irfan17fauzi17@gmail.com](mailto:irfan17fauzi17@gmail.com).

***Abstract.** Globalization has significantly transformed the landscape of educational policy by reshaping state authority, reconstructing governance structures, and strengthening global discourses that influence national decision-making processes. This study employs a qualitative library research approach by analyzing books, journals, and scholarly publications pertinent to global education policy. The findings demonstrate that the state no longer possesses exclusive authority over educational policymaking, as the global arena opens pathways for intervention by international organizations, global markets, and transnational actors. Moreover, globalization accelerates the digitalization of learning, reinforces quality standardization through international indicators, and shifts curriculum orientation toward twenty-first-century competencies. Nevertheless, the study highlights the risk of reification namely, the tendency to accept global influences uncritically without considering local socio-cultural contexts. The results underscore that the effectiveness of educational policy in the age of globalization depends on the state's capacity to critically select, interpret, and adapt global discourses in alignment with national identity, local needs, and long-term educational goals. Thus, globalization presents not only challenges but also strategic opportunities to enhance educational quality when approached with reflective and context-aware policymaking.*

Received November 10, 2025; Revised November 24, 2025; December 11, 2025

\*Corresponding author: [Botzah13@gmail.com](mailto:Botzah13@gmail.com)

# GLOBALISASI DAN PERGESERAN OTORITAS DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN

**Keywords:** *Educational Globalization, Education Policy, Global Discourse, State Authority, Digitalization.*

**Abstrak.** Globalisasi telah menghadirkan perubahan signifikan terhadap arah kebijakan pendidikan melalui pergeseran otoritas negara, rekonstruksi tata kelola pendidikan, serta penguatan wacana global yang membingkai proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui analisis mendalam terhadap buku, jurnal, serta berbagai publikasi ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa negara tidak lagi memegang kendali tunggal dalam menetapkan kebijakan pendidikan, karena proses global membuka ruang intervensi bagi lembaga internasional, pasar global, dan aktor transnasional. Di sisi lain, globalisasi mendorong digitalisasi pembelajaran, standardisasi kualitas melalui indikator internasional, serta pergeseran kurikulum menuju kompetensi abad ke-21. Namun demikian, kajian ini juga menegaskan adanya bahaya reifikasi, yakni kecenderungan untuk menerima pengaruh global secara *taken for granted* tanpa mempertimbangkan konteks sosial-budaya masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan di era global sangat bergantung pada kemampuan negara menyeleksi, mengolah, dan mengadaptasi wacana global secara kritis sehingga tetap sejalan dengan identitas nasional, kebutuhan lokal, dan tujuan pembangunan pendidikan. Dengan demikian, globalisasi bukan sekadar tantangan, melainkan peluang strategis untuk memperkuat kualitas pendidikan apabila dikelola dengan pemikiran yang reflektif dan selektif.

**Kata Kunci:** Globalisasi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan, Wacana Global, Otoritas Negara, Digitalisasi.

## LATAR BELAKANG

Kesadaran akan proses globalisasi menuntut perhatian terhadap dampak otoritas politik, praktik alokasi melalui negara yang direkonstitusi di tingkat nasional, dan pembingkai kebijakan dengan wacana yang sering kali memiliki latar belakang di berbagai jaringan global, dinegosiasikan dan diartikulasikan di tingkat regional, nasional, provinsi, dan lokal. Perubahan-perubahan ini telah disebut sebagai penyelamatan politik. Penyelamatan seperti itu telah memengaruhi konten kebijakan pendidikan jaringan baru

secara global. Perubahan yang terkait dengan proses globalisasi memunculkan serangkaian masalah politik, teoretis, dan metodologis baru, menuntut pertimbangan ulang tentang bagaimana kita seharusnya melakukan kebijakan pendidikan<sup>1</sup>.

Bahaya reifikasi (penilaian yang berdasarkan kebendaan), yang sering mengintai pertimbangan globalisasi dalam penelitian kebijakan pendidikan; yaitu godaan untuk menjelaskan pergeseran kebijakan hanya sebagai hasil sebab akibat dari proses global. Suatu kekeliruan jika hanya berfokus pada transformasi struktural yang ditampakan globalisasi, tanpa mengakui peran yang dimainkan oleh lembaga-lembaga politik dalam penciptaan praktik-praktik diskursif dan material yang terkait dengan kebijakan pendidikan. Perubahan sejarah dalam hubungan global pada kebijakan pendidikan perlu dipahami dalam konteks budaya dan politik yang spesifik, dengan fokus pada lembaga, organisasi, dan individu yang merupakan pembawa wacana kebijakan pendidikan global. Kebijakan pendidikan yang baik dengan demikian melibatkan pemahaman tentang bagaimana efek globalisasi benar-benar bekerja, dan bukannya menjadikan globalisasi sebagai penyebab utama pengembangan kebijakan baru.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Menurut Mestika Zed dalam Miza Nina Adlini dkk<sup>2</sup>, metode studi pustaka (*library research*) melibatkan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mencari informasi melalui sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti, buku-buku, artikel, jurnal, dan literatur karya tulis lain yang berkaitan dengan isi pembahasan. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa artikel, jurnal, dan buku terkait perbandingan Pendidikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>1</sup> FazalRivzi & Bob Lingard, *Kebijakan Pendidikan Global*, (Surabaya: CV. Pustaka Media Guru, 2020), h. 64.

<sup>2</sup> Miza Nina Adlini, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, & Sauda Yulia Merliyana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka", *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, Vol. 6 No. 1 (Maret, 2022), 974.

# GLOBALISASI DAN PERGESERAN OTORITAS DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN

## A. Pergeseran Otoritas Politik dalam Kebijakan Pendidikan Global

Globalisasi mengubah cara negara mengelola pendidikan. Negara tidak lagi berdiri sebagai satu-satunya penentu arah kebijakan, karena arus informasi, ekonomi, dan politik global bergerak melampaui batas-batas teritorial. Proses ini memaksa negara merumuskan ulang otoritas politiknya dalam pendidikan agar mampu merespons tekanan global, sekaligus mempertahankan karakter budaya dan politik nasional. Pergeseran otoritas politik ini terjadi melalui interaksi yang kompleks antara lembaga internasional, aktor transnasional, serta dinamika internal negara yang terus berubah.

H.A.R Tilaar dalam bukunya *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pegantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*<sup>3</sup>, menyatakan bahwa globalisasi menghadirkan perubahan sosial yang memengaruhi seluruh sektor kehidupan, termasuk pendidikan. Ia menegaskan bahwa negara tidak bisa lagi menjalankan perannya secara tertutup, karena jaringan global membawa nilai, standar, dan orientasi baru yang mendesak negara untuk menyesuaikan diri dalam pembentukan kebijakan pendidikan. Pengaruh global ini sering muncul melalui lembaga-lembaga internasional seperti UNESCO, Bank Dunia, dan OECD yang mendorong negara untuk mengikuti standar global seperti *Education for All (EFA)*, *Sustainable Development Goals (SDGs)*, hingga penilaian internasional seperti PISA. Di titik ini, otoritas negara mengalami pergeseran dari pengendali tunggal menjadi bagian dari jejaring global yang menuntut akuntabilitas, transparansi, dan kesetaraan akses pendidikan.

M. Sirozi dalam bukunya *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*<sup>4</sup>, juga menyatakan bahwa kebijakan pendidikan pada dasarnya merupakan arena kontestasi antara kepentingan kekuasaan dan orientasi pendidikan itu sendiri. Dalam konteks globalisasi, kontestasi ini semakin terbuka karena aktor-aktor transnasional membawa kepentingan ekonomi-politik yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan lokal. Ketika negara merespons tuntutan global seperti liberalisasi pendidikan, standardisasi kompetensi, atau orientasi pasar tenaga kerja, negara secara perlahan menyerahkan sebagian otoritasnya kepada kekuatan global. Kondisi ini menghadirkan ketegangan baru: di satu sisi negara

---

<sup>3</sup> H.A.R Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pegantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 41.

<sup>4</sup> M. Sirozi, *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 22.

ingin mempertahankan kontrol, tetapi di sisi lain negara terikat oleh arus global yang terus mendesak perubahan.

Darmaningtyas dalam bukunya *Pendidikan yang Memiskinkan*<sup>5</sup>, melihat bahwa dominasi aktor internasional dapat menciptakan praktik pendidikan yang merugikan masyarakat jika negara tidak mampu memainkan peran kritis. Ia menegaskan bahwa negara sering kali mengikuti arus kebijakan global tanpa mempertimbangkan konteks sosialnya sendiri. Dalam situasi seperti itu, pendidikan berpotensi menjadi alat reproduksi ketimpangan sosial. Pemikiran ini mengingatkan bahwa pergeseran otoritas bukan hanya persoalan teknis kebijakan, tetapi juga menyangkut siapa yang sebenarnya mendapatkan manfaat dari perubahan tersebut.

Kebijakan pendidikan harus dipahami sebagai bagian dari kebijakan publik yang selalu beririsan dengan kepentingan politik, ekonomi, dan tata kelola negara. Globalisasi membuat negara tidak sepenuhnya berdaulat dalam menentukan arah pendidikan, karena negara harus bernegosiasi dengan berbagai aktor global dan memerhatikan indikator-indikator internasional. Pergeseran otoritas politik tampak nyata ketika keputusan pendidikan mulai mengikuti arah indikator global misalnya peningkatan skor PISA, penyesuaian kurikulum berbasis kompetensi global, dan integrasi teknologi digital yang didorong oleh perkembangan global.

Dalam ranah akademik Indonesia, menunjukkan bahwa globalisasi pendidikan membawa tantangan besar bagi negara, termasuk tekanan untuk meningkatkan daya saing pendidikan nasional, memperkuat kualitas guru, dan memperluas akses pendidikan tinggi melalui skema internasionalisasi. Negara harus merespons tekanan ini dengan strategi yang tidak sekadar meniru tren global, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Tantangan tersebut semakin memperjelas bahwa otoritas negara tidak lagi bersifat sentralistik, melainkan tersebar dalam hubungan yang saling bergantung dengan jaringan global.

Sehingga, pendidikan dalam konteks global tetap harus berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan jangka panjang bangsa. Meskipun negara menghadapi tekanan global, ia harus memastikan pendidikan tidak larut dalam arus pasar, tetapi tetap memajukan kualitas manusia. Pesan ini penting, karena pergeseran otoritas politik sering

---

<sup>5</sup> Darmaningtyas, *Pendidikan yang Memiskinkan*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), h. 15.

# GLOBALISASI DAN PERGESERAN OTORITAS DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN

membuat negara terjebak dalam euforia globalisasi tanpa mempertimbangkan fondasi historis dan budaya masyarakat.

## **B. Rekonstitusi Negara dan Alokasi Kebijakan di Era Global**

Rekonstitusi negara dalam konteks globalisasi mengacu pada proses ketika negara tidak lagi menjadi satu-satunya pusat kendali kebijakan, tetapi justru menata ulang perannya agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi, politik, dan jaringan pengetahuan global. Dalam konteks pendidikan, negara dihadapkan pada tekanan untuk membuka ruang koordinasi dengan lembaga internasional, organisasi transnasional, dan pasar global, sekaligus mempertahankan otoritasnya sebagai regulator utama. Tekanan inilah yang mendorong negara melakukan reorganisasi kewenangan, model alokasi sumber daya, serta arah kebijakan pendidikan agar tetap relevan di tengah kompetisi global.

Perubahan struktur tata kelola pendidikan terlihat dari pergeseran orientasi negara: dari birokrasi yang serba terpusat menuju model *governance* yang lebih kolaboratif, adaptif, dan berbasis jejaring. Jejen Mustafah dalam bukunya *Analisis Kebijakan Pendidikan: Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0*<sup>6</sup>, menjelaskan bahwa globalisasi mendorong negara bergerak dari regulator tunggal menjadi *network state* yang mengandalkan kemitraan antara pemerintah, pasar, dan masyarakat sipil dalam merumuskan arah pendidikan nasional. Negara tidak lagi memonopoli proses pengambilan keputusan, melainkan membuka ruang negosiasi melalui standar global, asesmen internasional, benchmarking, dan program kerja sama internasional. Situasi ini menunjukkan bahwa rekonstruksi negara bukanlah pelemahan peran negara, tetapi transformasi fungsi agar tetap mampu mengatur praktik pendidikan yang semakin kompleks.

Di sisi lain, rekonstruksi negara juga berdampak pada cara alokasi kebijakan dilakukan. Jika dahulu distribusi anggaran, regulasi kurikulum, dan perencanaan program pendidikan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, kini prosesnya melibatkan berbagai aktor yang membawa kepentingan, narasi, dan ideologi global tertentu. Lembaga internasional seperti OECD, UNESCO, dan Bank Dunia sering mempengaruhi arah kebijakan melalui rekomendasi, pendanaan, maupun indikator kualitas pendidikan.

---

<sup>6</sup> Jejen Mustafah, *Analisis Kebijakan Pendidikan: Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 44.

Pengaruh ini membuat negara harus menimbang secara cermat apakah kebijakan yang diadopsi benar-benar menjawab kebutuhan lokal atau sekadar mengikuti arus global. Dengan kata lain, rekonstruksi negara menciptakan ruang tarik-menarik antara tuntutan global dan kepentingan nasional.

Dalam pandangan pemakalah, rekonstruksi negara seharusnya tidak dipahami sebagai bentuk penyerahan kedaulatan, melainkan sebagai strategi adaptif untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan tetap relevan dan kompetitif tanpa kehilangan akar sosial-budayanya. Negara perlu berperan sebagai *filter ideologis*, bukan hanya *penerima kebijakan global*. Globalisasi memang memperkaya referensi kebijakan, tetapi negara memiliki tanggung jawab moral untuk memilih, menyesuaikan, dan menerjemahkan gagasan global sesuai konteks lokal. Rekonstruksi negara idealnya menjadi proses yang memperkuat kapasitas negara dalam mengelola perubahan, bukan membuatnya bergantung pada narasi global.

Rekonstruksi negara dan alokasi kebijakan di era global menuntut cara pandang baru dalam memahami dinamika pendidikan. Kebijakan tidak bisa lagi dipahami hanya sebagai produk rasional negara, tetapi sebagai hasil interaksi multilapis antara aktor global, nasional, dan lokal. Negara harus mampu menjaga keseimbangan: terbuka terhadap globalisasi, tetapi tetap berpijak pada kebutuhan dan identitas nasional. Di titik inilah rekonstruksi negara menemukan urgensinya bukan sekadar menata ulang kewenangan, tetapi memastikan bahwa pendidikan berkembang sebagai ruang kedaulatan intelektual bangsa di tengah arus global.

### **C. Peran Wacana Global dalam Pembingkai Kebijakan Pendidikan**

Wacana global memainkan peran yang semakin menentukan dalam membentuk cara negara memahami, merumuskan, dan mengarahkan kebijakannya. Arus ide, standar, dan narasi internasional mulai dari tuntutan kualitas global, kompetensi abad ke-21, literasi digital, hingga urgensi transformasi pendidikan pascapandemi menggeser cara negara menilai masalah pendidikan dan menetapkan prioritas kebijakan. Narasi-narasi global inilah yang menjadi bingkai konseptual yang memandu negara ketika mengidentifikasi apa yang dianggap penting, mendesak, dan strategis dalam pengembangan pendidikan nasional.

Proses pembingkai tersebut berjalan melalui mekanisme diskursif yang sangat kuat. Organisasi internasional seperti UNESCO, OECD, dan Bank Dunia memproduksi

## GLOBALISASI DAN PERGESERAN OTORITAS DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN

model kebijakan, indikator mutu, serta rekomendasi berbasis riset yang kemudian menyebar ke berbagai negara. Jejen Mustafah dalam bukunya *Analisis Kebijakan Pendidikan: Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0*<sup>7</sup>, menjelaskan bahwa wacana global sering bekerja melalui bahasa yang persuasif seperti efisiensi, inovasi, daya saing, dan transformasi digital sehingga negara merasa perlu menyesuaikan arah kebijakannya agar tidak tertinggal dalam percaturan global. Bahasa inilah yang kemudian membingkai kebijakan nasional, memengaruhi pemilihan program, alokasi anggaran, hingga arah reformasi kurikulum.

Wacana global juga memengaruhi persepsi negara terhadap peran pendidikan. Banyak negara, termasuk Indonesia, tidak lagi melihat pendidikan hanya sebagai instrumen peningkatan literasi dasar, tetapi sebagai fondasi mobilitas ekonomi, pertumbuhan nasional, dan daya saing internasional. Zaini Tamin AR dkk dalam bukunya *Politik Pendidikan: Konsep dan Praktik Kebijakan Pendidikan di Indonesia*<sup>8</sup>, menegaskan bahwa perubahan wacana global menggeser orientasi kebijakan pendidikan dari pendekatan yang hanya memenuhi kebutuhan internal menuju model yang berorientasi pada tantangan global, seperti integrasi teknologi, kompetensi lintas-budaya, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial yang cepat. Akibatnya, negara terdorong untuk menata ulang prioritas kebijakan agar selaras dengan tren global yang terus berkembang.

Dalam pandangan pemakalah, wacana global memiliki kekuatan yang tidak dapat diabaikan, tetapi negara tetap memiliki ruang untuk menegosiasikannya. Wacana global tidak seharusnya diterima begitu saja sebagai kebenaran universal; negara harus menafsirkan ulang narasi tersebut agar sesuai dengan identitas, kebutuhan, dan tujuan pendidikan nasional. Globalisasi dapat memperkaya perspektif, tetapi kebijakan yang efektif tetap lahir dari kemampuan negara memilih dan mengadaptasi wacana global berdasarkan konteks lokal. Dengan demikian, pemingkai kebijakan oleh wacana global seharusnya menjadi proses dialogis, bukan proses adopsi sepihak.

Peran wacana global dalam pemingkai kebijakan pendidikan terletak pada kemampuannya mengarahkan perhatian negara kepada isu-isu yang lebih luas daripada

---

<sup>7</sup> Ibid, h. 58.

<sup>8</sup> Zaini Tamin AR., et al, *Politik Pendidikan: Konsep dan Praktik Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, (Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2018), h. 101.

batas nasional. Namun, kekuatan wacana tersebut baru akan bermakna ketika negara mampu memadukannya dengan kearifan lokal, visi pendidikan nasional, dan kebutuhan peserta didik yang nyata. Di sini letak tantangan terbesar negara: menjaga agar pembingkai global tidak menghilangkan karakter pendidikan nasional, tetapi justru memperkuatnya melalui dialog yang kritis, selektif, dan berorientasi masa depan.

#### **D. Bahaya Reifikasi dalam Membaca Globalisasi Pendidikan**

Bahaya reifikasi dalam membaca globalisasi pendidikan muncul ketika kita memandang globalisasi sebagai entitas yang berdiri sendiri, bekerja secara otomatis, dan menentukan arah kebijakan tanpa campur tangan manusia maupun kepentingan politik. Cara pandang seperti ini membuat globalisasi tampak seperti kekuatan yang absolut dan tak terbantahkan, seolah seluruh perubahan kebijakan pendidikan selalu lahir dari arus global yang tidak dapat dinegosiasikan. Padahal, globalisasi selalu bergerak melalui aktor baik negara, organisasi internasional, lembaga pendidikan, maupun kelompok kepentingan yang mengolah, menafsirkan, dan mengartikulasikan wacana global sesuai dengan tujuan dan konteks masing-masing.

Bahaya lainnya muncul ketika reifikasi membuat para pembuat kebijakan meyakini bahwa semua negara harus bergerak seragam mengikuti model-model yang diproduksi oleh lembaga global, seperti OECD atau Bank Dunia. Padahal, setiap masyarakat memiliki konfigurasi sosial, budaya, dan politik yang berbeda, sehingga kebijakan pendidikan semestinya dibangun berdasarkan pertimbangan internal sekaligus refleksi kritis terhadap pengaruh global. Jika negara menerima globalisasi secara *taken for granted*, kebijakan pendidikan akan cenderung teknokratis dan kehilangan kepekaan terhadap realitas lokal.

Pemakalah memandang bahwa membaca globalisasi pendidikan membutuhkan kesadaran metodologis: globalisasi bukan sebab tunggal, melainkan medan wacana yang dinegosiasikan terus-menerus. Dengan memahami globalisasi sebagai proses sosial-politik yang penuh interpretasi, negara dapat membangun kebijakan yang tidak sekadar meniru, tetapi mengolah wacana global sesuai dengan visi pendidikan nasional. Reifikasi harus dihindari agar globalisasi tidak menjadi “mitos kebijakan” yang menutupi peran lembaga politik, konteks budaya, dan aspirasi masyarakat yang seharusnya menentukan arah pendidikan.

## GLOBALISASI DAN PERGESERAN OTORITAS DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Dengan demikian, bahaya reifikasi bukan hanya persoalan konseptual, tetapi juga politis. Reifikasi dapat membuat pembuat kebijakan mengabaikan aktor lokal, memperlemah otonomi negara, dan menggeser orientasi pendidikan dari kepentingan publik menuju kepentingan pasar global. Karena itu, membaca globalisasi pendidikan membutuhkan sikap kritis agar negara tetap mampu memanfaatkan peluang global tanpa kehilangan pijakan identitas dan kebutuhan nasional.

### **E. Tren Globalisasi Pendidikan Masa Kini dan Dampaknya**

Globalisasi pendidikan pada masa kini bergerak melalui arus teknologi, mobilitas ilmu pengetahuan, dan perluasan standar internasional yang mengikat banyak negara. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak lagi berdiri dalam batas teritorial, tetapi terhubung dalam jaringan global yang memproduksi gagasan, kompetensi, dan strategi pembelajaran baru. Negara yang ingin tetap relevan dalam percaturan global harus membaca tren ini dengan cermat, sebab arus global membawa peluang sekaligus risiko yang memengaruhi arah kebijakan, praktik pembelajaran, dan masa depan generasi muda.

Salah satu tren paling kuat ialah digitalisasi pembelajaran yang merambah semua level pendidikan. Ellyzabeth Sukmawati, Heri Fitriadi, Yudha Pradana dkk dalam bukunya *Digitalisasi Sebagai Pengembangan Model Pembelajaran*<sup>9</sup>, menjelaskan bahwa digitalisasi telah mengubah cara peserta didik memperoleh informasi, memaksa institusi pendidikan untuk merombak metode pembelajaran, kurikulum, dan sistem evaluasi agar selaras dengan kebutuhan zaman. Perubahan ini tidak lagi bersifat pilihan, melainkan keharusan, karena ekosistem global menempatkan literasi digital sebagai kompetensi dasar yang menentukan daya saing suatu bangsa. Bersamaan dengan itu, negara-negara juga berlomba mengintegrasikan kecakapan abad ke-21 dengan kolaborasi, kreativitas, pemecahan masalah, dan literasi teknologi ke dalam kurikulum sebagai respons terhadap tuntutan ekonomi global.

Globalisasi pendidikan juga memperkuat mobilitas pemikiran dan referensi kebijakan. Banyak negara kini merujuk pada standar internasional seperti PISA, SDGs, atau kerangka kompetensi global untuk menilai kualitas pendidikannya. Akibatnya, arah kebijakan tidak hanya mencerminkan kebutuhan lokal, tetapi juga terpengaruh oleh

---

<sup>9</sup> Ellyzabeth Sukmawati, Heri Fitriadi, Yudha Pradana., et al, *Digitalisasi Sebagai Pengembangan Model Pembelajaran*, (Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2022), h. 90.

ekspektasi global mengenai kualitas, efisiensi, dan daya saing. Hal ini dapat memperluas wawasan negara, tetapi juga menuntut kemampuan kritis dalam memilah narasi global yang benar-benar relevan.

Dalam pandangan pemakalah, tren globalisasi pendidikan menawarkan peluang besar bagi negara untuk memperkaya kualitas sistem pendidikannya. Namun, negara tetap memerlukan kecermatan agar tidak larut dalam arus global yang sering kali mengabaikan konteks lokal. Globalisasi seharusnya menjadi sumber inspirasi, bukan tekanan yang membuat negara kehilangan arah dan karakter pendidikannya sendiri. Karena itu, respons terhadap globalisasi membutuhkan keseimbangan antara keterbukaan terhadap inovasi global dan keteguhan menjaga nilai-nilai pendidikan nasional.

Adapun dampak tren globalisasi pendidikan masa kini, antara lain<sup>10</sup>:

1. Peningkatan digitalisasi pembelajaran, yang mendorong institusi pendidikan beradaptasi dengan teknologi baru secara berkelanjutan.
2. Standarisasi kualitas pendidikan, karena negara semakin memperhatikan indikator global seperti PISA atau SDGs.
3. Perubahan kurikulum, terutama pada integrasi kompetensi abad ke-21 dan literasi digital.
4. Meningkatnya mobilitas ilmu dan praktik pendidikan, karena akses terhadap model kebijakan internasional semakin mudah.
5. Tuntutan peningkatan kompetensi guru, terutama dalam pedagogi digital dan penguasaan teknologi.
6. Risiko homogenisasi pendidikan, karena negara rentan meniru standar global tanpa mempertimbangkan konteks lokal.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Hasil kajian menunjukkan bahwa globalisasi mendorong perubahan mendasar dalam arah kebijakan pendidikan melalui pergeseran otoritas politik, rekonstruksi peran negara, serta penguatan pengaruh wacana global dalam pembentukan kebijakan. Negara berinteraksi dalam jejaring global yang melibatkan lembaga internasional, pasar global,

---

<sup>10</sup> M. Afiv Toni Suhendra Saragih., et al, *Kajian Komprehensif Globalisasi Pendidikan di Era Digital*, (Medan: UMSU Press, 2025), h. 45.

# GLOBALISASI DAN PERGESERAN OTORITAS DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN

dan aktor transnasional, sehingga proses pengambilan keputusan pendidikan tidak lagi berdiri di atas kepentingan internal semata. Globalisasi juga menghadirkan peningkatan digitalisasi pembelajaran, standarisasi mutu berdasarkan indikator internasional, serta integrasi kompetensi abad ke-21 dalam kurikulum. Namun, kajian ini menegaskan bahwa reifikasi menjadi ancaman ketika negara mengikuti arus global tanpa memperhatikan kondisi sosial-budaya dan kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, hasil kajian menegaskan bahwa globalisasi membuka peluang peningkatan kualitas pendidikan, tetapi keberhasilan transformasi tetap bergantung pada kemampuan negara menyeleksi, menafsirkan, dan mengadaptasi pengaruh global agar selaras dengan identitas nasional dan tujuan pembangunan pendidikan.

## Saran

Kajian ini menyarankan agar negara memperkuat kapasitas analisis kebijakan yang berbasis pada konteks lokal agar pengaruh global tidak diterima secara mentah, tetapi diadaptasi sesuai kebutuhan masyarakat. Negara perlu menempatkan globalisasi sebagai rujukan reflektif, bukan sebagai model yang harus ditiru sepenuhnya. Selain itu, pengembangan kompetensi pendidik, penguatan literasi digital, serta peningkatan kemandirian dalam perumusan kurikulum harus menjadi prioritas agar sistem pendidikan mampu bersaing secara global tanpa kehilangan identitas nasional. Dengan keseimbangan tersebut, globalisasi dapat dimanfaatkan sebagai peluang strategis untuk memperkaya kualitas pendidikan nasional.

## DAFTAR REFERENSI

- Adlini, M. N., Hanifa Dinda, A., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. Y. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974.
- Darmaningtyas. (2015). *Pendidikan Yang Memiskinkan*. Intrans Publishing.
- Lingard, B., & Rizvi, F. (2020). *Kebijakan Pendidikan Global*. CV. Pustaka Media Guru.
- Mustafah, J. (2021). *Analisis Kebijakan Pendidikan: Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0*. Kencana.
- Saragih, M. A. T. S., et al. (2025). *Kajian Komprehensif Globalisasi Pendidikan Di Era Digital*. UMSU Press.

- Sirozi, M. (2010). *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan Dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*. RajaGrafindo Persada.
- Sukmawati, E., Fitriadi, H., Pradana, Y., et al. (2022). *Digitalisasi Sebagai Pengembangan Model Pembelajaran*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Tamin, Z., et al. (2018). *Politik Pendidikan: Konsep Dan Praktik Kebijakan Pendidikan Di Indonesia*. CV. Dwiputra Pustaka Jaya.
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Perubahan Sosial Dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia*. Grasindo.